



Rektor Prof Sofyan Anif menerima sertifikat MuRI dari Sri Widayati

KR-Qomarul Hadi

TERIMA PENGHARGAAN MURI

UMS 'Grand Opening' Sambut Maba

SOLO (KR) - Di tengah perguruan tinggi (PT) lain masih sibuk berburu mahasiswa baru, Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) justru sudah menggelar *grand opening* masa taaruf dan penyambutan mahasiswa baru (maba) (Masta PMB) tahun akademik 2020/2021. Kegiatan Masta PMB yang dilaksanakan secara daring di auditorium Muh Djazman, Senin (13/7), mendapat penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MuRI).

MuRI mencatat, UMS merupakan PT pertama yang menyelenggarakan penyambutan mahasiswa baru secara daring. "UMS yang pertama menggelar penyambutan mahasiswa baru di tengah pageblug Covid-19.

Tercatat ada 4734 mahasiswa baru yang tereg-

istrasi mengikuti acara penyambutan," jelas Sri Widayati dari MuRI sebelum menyerahkan sertifikat kepada Rektor UMS Prof Dr Sofyan Anif MSI. Ternyata pandemi Covid 19 tidak menghalangi UMS untuk berkarya. Masta PMB diisi ceramah Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Dr Haedar Nashir tentang "Internasionalisasi nilai keilmuan dan Keislaman menuju mahasiswa yang berdaya saing di masa pandemi Covid 19".

Masta ditandai penyerahan jaket almamater dan topi oleh Rektor Prof Sofyan Anif. Kemudian secara bersama-sama mahasiswa mengenakan jaket dan topi. Selanjutnya semua peserta harus membuat laporan dan mengirimkan foto.

"Setelah grand opening

mahasiswa baru mengikuti berbagai kegiatan secara online selama tiga hari," jelas Ahmad Kholid Algofari, Kabag Penalaran, Kreativitas dan Softskill UMS.

Platform kegiatan yakni psikologi. UMS telah menyiapkan video materi yang harus diikuti. Setelah menonton mahasiswa harus berkomentar dan mengikuti post test. Ada 9 materi post tes yang menentukan kelulusan Masta. Kegiatan terakhir adalah ekspo ormawa pada 22 Agustus.

Vania NurAdani, mahasiswa baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) mengaku senang mengikuti Masta online. Melalui kegiatan ini mahasiswa baru segera bisa mengetahui berbagai hal yang ada di kampusnya.

(Qom)-o

MULAI DIGUNAKAN PADA TA 2020/2021

Kemenag Sempurnakan Kurikulum PAI

JAKARTA (KR) - Kementerian Agama (Kemenag) telah menyempurnakan kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab (PAIBA) untuk madrasah. Penyempurnaan kurikulum ini tertuang dalam Keputusan Menag (KMA) No 183 tahun 2019 tentang Kurikulum PAIBA di madrasah. Kurikulum baru ini digunakan mulai Tahun Ajaran (TA) 2020/2021.

Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Pendidikan Islam, Kamaruddin Amin mengatakan, KMA No 183 tahun 2019 tidak mengubah secara total isi kurikulum sebelumnya yang tertuang dalam KMA 165 tahun 2014. "Kurikulum baru hanya menyempurnakan beberapa Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD)," tegasnya di Jakarta, Senin (13/7).

Menurut Kamaruddin, ada tiga persamaan kedua KMA ini. Pertama, persamaan mata pelajaran. Kurikulum madrasah terdiri atas Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) dan Bahasa Arab. Persamaan kedua, tetap menggunakan prinsip pembelajaran pada Kurikulum Nasional 2013. Ketiga, menggunakan prin-

sip penilaian yang berlaku pada kurikulum Nasional 2013 yang disempurnakan.

Dijelaskan Kamaruddin, penyempurnaan kurikulum antara lain didasarkan pada hasil penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan Kemenag. Puslitbang antara lain menemukan adanya beberapa struktur materi antar jenjang dan antar kelas yang tumpang tindih. Penelitian ini juga menilai perumusan level kompetensi masih terlalu rendah. Temuan lainnya adalah materi Bahasa Arab dinilai cenderung strukturalis.

Berdasarkan temuan tersebut dan hasil kajian

umum, Kemenag merasa perlu melakukan penyesuaian kurikulum di madrasah untuk memenuhi kebutuhan perkembangan pendidikan Abad 21, kebutuhan pembentukan karakter bangsa Indonesia sebagai warga dunia serta pencapaian visi Indonesia Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur.

"Penyempurnaan ini pada aspek kedalaman materi. Harapannya, siswa semakin memahami ajaran agama dan Bahasa Arab. Keduanya diharapkan bisa menjadi bekal siswa menjadi warga bangsa yang bisa hidup dalam keberagaman dan tetap kompetitif dalam kemajuan zaman," tandasnya.

(Ati)-o

PEMBUKAAN SEKOLAH DI ZONA HIJAU

Mendikbud: Orangtua Berhak Menolak Tatap Muka

JAKARTA (KR) - Pandemi Covid-19 membuat pembelajaran yang sedianya dilakukan secara tatap muka beralih menjadi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), baik secara daring (daring) maupun luar jaringan (luring). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Agama (Kemenag) telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Panduan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran Baru dan Tahun Akademik Baru di Masa Pandemi Covid-19.

Mendikbud Nadiem Anwar Makarim, dalam wawancara telekonferensi menyebutkan, terdapat beberapa kabupaten/kota yang merupakan zona hijau menurut Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nasional. Dengan demikian di-

mungkinkan memulai pembelajaran tatap muka dengan persyaratan protokol kesehatan yang ketat. Kendati demikian, prosesnya dilakukan secara bertahap, yakni dimulai dari jenjang SMP dan SMA/SMK terlebih dahulu.

"Ini mengenai kenyamanan, mengenai kepercayaan kita kepada institusi sekolah yang bisa melakukan protokol kesehatan yang baik. Itu kuncinya," disampaikan Mendikbud saat wawancara program 'Ini Budi' secara virtual di Jakarta, kemarin.

Kebijakan membuka sekolah kembali untuk dapat menyelenggarakan pembelajaran tatap muka berada di tangan kepala daerah. Selain kepala daerah, kepala sekolah dan orang tua juga punya hak untuk menentukan apakah memang sekolah tersebut sudah siap untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka kembali.

"Jadinya, sekolah-sekolah kalau mau membuka kembali pembelajaran tatap muka harus benar-benar meyakinkan semua orang tua bahwa protokol kesehatan di sekolahnya itu sudah sangat mapan," kata Mendikbud.

Kemudian, apabila ada orang tua yang merasa tidak siap jika anaknya harus kembali bersekolah, berhak untuk menolak dan anak tetap melanjutkan pembelajaran dari rumah.

"Jadi, kita benar-benar harus memegang prinsip kebebasan memilih. Karena ini kan mengenai kesehatan masing-masing," ujar Mendikbud.

Saat ini, Kemendikbud sedang melakukan monitoring untuk memeriksa kesiapan beberapa wilayah zona hijau yang akan menerapkan pembelajaran tatap muka kembali.

(Ati)-o

DARI 2,3 JUTA, BARU 201.800 YANG MENDAFTAR

UMKM Belum Manfaatkan Insentif Pajak PPh Final

JAKARTA (KR) - Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan, dari 2,3 juta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki NPWP dan membayar pajak tahun 2019 lalu, baru sekitar 201.880 yang mendaftar untuk mendapatkan insentif pajak atau PPh final sebesar 0,5 persen dari pemerintah. Yang menjadi pertanyaan, kenapa UMKM belum banyak yang memanfaatkan insentif pajak ini.

"Tahun 2019 UMKM yang membayar pajak itu 2,3 jutaan dan mereka memiliki NPWP. Nah sekarang yang daftar baru 201.880 untuk mendapat insentif. Pemerintah memberikan insentif pajak PPh final untuk UMKM yang seharusnya mereka bayar 0,5 persen. Ini dibebaskan atau pajaknya dibayarin pemerintah hingga bulan September 2020 dan kemungkinan akan diperpanjang hingga bulan Desember 2020, kok masih pada belum daftar,"

tanya Suryo Utomo pada seminar tentang UMKM Bangkit Bersama Pajak secara virtual di Jakarta, Senin (13/7).

Dikatakan, kalau normalnya UMKM membayar pajak penghasilan 0,5 persen dari omzet mereka. Tahun 2019, ada 2,3 juta UMKM yang membayar pajak penghasilan 0,5 persen ini. Namun setelah pandemi, pemerintah memberikan pembebasan pajak penghasilan untuk UMKM. Mereka yang bisa menerima adalah UMKM dengan omzet di bawah Rp

4,8 miliar pertahun atau Rp 13,1 juta pertahun.

Suryo mengaku, pihak DJP juga sudah mengirim email sosialisasi insentif pajak ini kepada sekitar 2 juta akun. Tujuannya, agar data pengguna manfaat fasilitas PPh Final ini meningkat. Sebanyak 90 persen email tersebut sudah sampai ke tangan UMKM, namun angka untuk pendaftaran PPh ini juga belum meningkat.

"Kalau boleh saya mengajak untuk UMKM yang belum, apakah mereka yang belum mendengar.

Saya sudah minta teman-teman di KPP sudah melakukan supaya informasi ini sampai ke WP, ada 2 jutaan kita kirim email, 90 persen sampai ke tujuan, tapi sampai statistik ini belum bergerak signifikan," jelasnya.

Menurut Suryo, bagi UMKM yang terdampak Covid-19 bisa langsung mendaftar atau mengusulkan kepada Ditjen Pajak melalui website resmi. Pada situs tersebut juga tersedia informasi lengkap yang bisa dipenuhi pelaku UMKM untuk mendapat fasilitas.

"Cara daftarnya nggak susah dengan online, ini nanti akan kita berikan sedikit relaksasi, dengan PMK 44 mereka hanya menyampaikan informa-

si ingin memanfaatkan dan mereka melaporkan, omzetnya sekian, jumlah PPH yang ditanggung pemerintah sekian," katanya.

Sementara itu Deputi Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Victoria Simanungkalit membenarkan insentif ini belum dinikmati maksimal semua UMKM.

"Masalahnya adalah masih banyak pelaku UMKM yang belum mengetahui dan memahami perlunya membayar pajak beserta insentif yang diberikan pemerintah. UMKM harus mengajukan terlebih dahulu sebelum mendapatkannya. Mereka anggap otomatis, padahal harus mengajukan," katanya.

(Lmg)-o

IMPLEMENTASIKAN SOP SERBA TEKNOLOGI

Pelaku Industri Pariwisata DIY Matangkan Sanksi

YOGYA (KR) - Pelaku industri pariwisata di DIY baik Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Organda hingga Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) dinilai telah siap melaksanakan Standard Operating Procedure (SOP) kenormalan baru pariwisata dan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dengan mengedepankan serba teknologi. Selain itu, para pelaku pariwisata di DIY tersebut tengah mematangkan penghargaan sebagai wujud apresiasi yang bisa melaksanakan SOP dengan baik dan sanksi sebagai teguran apabila terjadi pelanggaran SOP nantinya

"Kita ingin menyatukan visi dan pendapat dengan seluruh anggota yang tergabung dalam Asita DIY mulai dari kedatangan tamu dari bandara, di mobil, masuk destinasi, di hotel hingga kembali pulang via bandara lagi. Kita mengajak PHRI, Organda dan HPI DIY guna menyamakan persepsi dan ternyata semuanya telah siap melaksanakan SOP pariwisata tersebut," tutur Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asita DIY Udhji Sudiyanto di

Yogyakarta, Senin (13/7).

Udhji menyampaikan disamping membahas kesiapan implementasi SOP pariwisata, sekaligus dibahas perihal sanksi apabila SOP tersebut tidak dipatuhi atau dilanggar dalam kesempatan yang sama. Sanksi baik berupa teguran atau peringatan tersebut supaya baik pelaku industri pariwisata maupun wisatawan sendiri patuh terhadap SOP pariwisata tersebut. Selain sanksi, pelaku industri pariwisata di DIY tersebut akan memberikan apresiasi apabila berhasil mematuhi dan melaksanakan SOP pariwisata.

Asita DIY pun sekaligus melakukan simulasi SOP pariwisata khususnya Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) yang ada di perhotelan. Pelaksanaan MICE ini meskipun dilakukan secara offline tetapi semuanya serba menggunakan teknologi digital.

Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) DIY Singgih Raharjo mengapresiasi simulasi SOP pariwisata yang dilakukan para pelaku pariwisata di DIY baik dari Asita, PHRI, Organda, HPI dan sebagainya.

(Ira) -o

Pasar Harus Patuhi SOP Protokol Kesehatan

YOGYA (KR) - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) DIY meminta agar pasar rakyat maupun pasar modern benar-benar mematuhi Standard Operating Procedure (SOP) dan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 khususnya sektor perdagangan. Hal ini supaya pasar yang berjumlah sebanyak 344 pasar kabupaten maupun pasar desa dan 704 toko modern di DIY sebagai pusat kegiatan perekonomian terus berjalan dengan mematuhi SOP dan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 yang ditetapkan.

Kepala Disperindag DIY Aris Riyanta mengakui, pasar rakyat maupun pasar modern sangat rentan terhadap munculnya penularan kasus Covid-19, seperti munculnya kasus positif virus Korona pedagang pasar di Bantul belum lama ini. Penularan virus Korona ini prinsipnya karena tidak tertib terhadap standar dan protokol kesehatan yang diberlakukan di sektor perdagangan.

"Kita harapkan pengelola pasar melakukan pengawasan dan pengontrolan pelaksanaan SOP maupun protokol kesehatan sebab merekalah yang setiap harinya ada di pasar tersebut. Pengelola pasar kami minta tertib dan rajin mengamati langsung di lapangan agar taat kepada protokol kesehatan yang berlaku," tutur Aris di Kompleks Kepatihan, Senin (13/7).

Aris meminta seluruh elemen masyarakat di sektor perdagangan baik pedagang, pengelola maupun pembeli menaati dan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku dimanapun berada baik di pasar tradisional, pasar swalayan, toko berjejaring dan lainnya.

(Ira)-o

EKONOMI

Ketenagakerjaan

MAGDALENA SUKARTONO - LPSDM ABISATYA PARAMITRA



Siap dengan Tuntutan Masa Kini ?

BEBERAPA hari lalu saya ke RS Bethesda. Cek kesehatan rutin. Terkejut saya melihat betapa 'lengang'nya suasana di RS dibanding biasanya yang berjubel dan antrian panjang. Saya bertemu beberapa orang kenalan. Ada pengusaha dan ada karyawan. Pengusaha mengeluh terpaksa menutup sementara usahanya. Saya bertanya: "Bagaimana dengan karyawannya ?" "Tetap diberi gaji tapi berbeda. Yang tim manajemen 50 % dan yang karyawan biasa 25%. Wuih...mirip yang di Jakarta ya. Karyawan yang saya jumpai bercerita bahwa perusahaannya biasa-biasa saja. Tetap kerja tetap pula gajinya. Jadi memang berbeda. Tergantung perusahaan apa dan bagaimana mengelolanya.

Terlepas dari sikon sekarang ini, yang dibutuhkan oleh perusahaan adalah karyawan yang tahan uji. Yang smart. Yang kreatif inovatif. Yang loyal dan punya dedikasi tinggi. Bicara tentang karyawan atau sumber daya manusia yang disingkat SDM, kita perlu tahu, seperti apakah tipe atau kualitas karyawan yang dicari dan disukai para pimpinan perusahaan? Banyak teori dan pendapat para ahli tentang kriteria SDM yang berkualitas. Kapabel. Kredibel. Apa lagi? Dari 'survey' atau lebih tepatnya pengalaman saya jungkir balik di dunia kerja lebih dari 1/2 abad, bahkan hingga sekarang ini, dapat saya simpulkan sebagai berikut.

Tipe karyawan yang diminati atau dicari atau diburu oleh perusahaan pada umumnya adalah mereka yang punya etos kerja tinggi. Seperti disiplin - jujur - tanggungjawab - kreatif - inovatif - semangat - loyal- punya dedikasi - bisa bekerjasama- punya etika dan siap multi fungsi. Ya...itu syarat-syarat waktu dulu. Sekarang ada tambahan yang baru. Pasti ingin tahu, kan ? Seperti apa ya bro & sis ? Nah...siapa catat ya...!Selain hal-hal di atas, sekarang di abad 21 ini, banyak perusahaan nasional & multi nasional menyodorkan persyaratan tambahan lagi, bahwa SDM IDEAL DI ERA DIGITAL INI HARUSLAH MEMENUHI SYARAT sebagai berikut: 1. Berwawasan luas, menguasai IT dan bahasa Inggris disamping penampilan menunggal.2. Berkarakter. Bersikap tegas dan bermental baja. Tak mudah menyerah.3. Tahan banting. Artinya siap bekerja keras tanpa menuntut gaji tinggi di awal kerjanya. 4. Bersedia melakukan tugas apapun yang diperlukan perusahaan. Siap multi fungsi. Siap mutasi. Siap juga dikirim ke luar daerah bahkan luar negeri. 5. Mereka yang tampak teguh dan tidak lari dari masalah. Yang berprinsip ! 6. Yang konsekuen punya komitmen atau sesuai antara apa yang dikatakan dan dilakukannya.7. Memiliki karakter "to take & to give". Bisa menerima tapi juga bisa memberi. Baik memberi saran, memberi semangat & dorongan, memberi telinga untuk mendengarkan maupun memberi arahan atau bimbingan.8. Memiliki toleransi. Bukan tipe yang fanatik. Siap berkompromi.Hal ini penting supaya tidak menjadi "pemberontak" atau penggerak karyawan melawan manajemen pada saat situasi terjadi ketidakpuasan terhadap kebijakan Pucuk Pimpinan. Dengan kata lain bukan mereka yang punya bakat agitator... atau punya jiwa penghasut atau penggerak demo. Itulah tipe dan sifat-sifat yang disukai dalam proses rekrutmen sekarang ini.Bagaimana dengan Pembaca ? Jika Anda Pengusaha, apakah ingin mencari SDM seperti kriteria di atas ?Jika Anda pencari kerja, apakah Anda SIAP DENGAN TUNTUTAN MASA KINI ? Q-o